

HTI **Bergerilya di antara Islam dan Islamisme**

Oleh: M u s a

Ada amsal yang begitu mengakar di masyarakat Muslim, bahwa agama yang mereka peluk, yaitu Islam, memiliki pengertian ganda *din* wa *daulah*. *Din* adalah agama, dan *daulah* adalah negara. Dalam perjalanan sejarah umat Islam, amsal tersebut telah dipahami dalam berbagai persepsi dan coba diwujudkan dalam aneka praksis politik yang berbeda. Di satu sisi konsep *din* dirumuskan dengan kewenangan yang luas mencakup juga urusan *daulah* (sampai muncul keyakinan tanpa adanya *daulah* maka eksistensi agama akan pudar). Di sisi lain sisi kuasa *din* dipahami terbatas dengan *daulah* adalah zona otonom yang diatur secara tersendiri berdasarkan hukum politik dan prinsip-prinsip kenegaraan modern. Semestinya *din* (sebagai keyakinan agama) dan *daulah* (sebagai praksis politik kenegaraan) adalah dua gatra yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam wacana keilmuan kontemporer, konsep *din* dipakai mewakili elemen “Islam” dan *daulah* adalah ekspresi sosial-politik dari *din* yang biasa diistilahkan dengan “Islamisme.” Dua elemen ini ternyata berayun bagai bandul yang bergerak begitu dinamis menggambarkan betapa lekatnya hubungan antara aspirasi keagamaan dan kehidupan politik di masyarakat Muslim, seperti tercermin pada sejarah dan kiprah ormas HTI di Indonesia.

A. Pendahuluan

Arti penting HTI dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia didukung oleh kenyataan bahwa organisasi yang populer ini memiliki daya hidup yang luar biasa. Begitu ulet dan alot, sehingga tidak gampang diberangus atau dihentikan begitu saja langkahnya walaupun secara hukum telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Segera pengamat dapat membuat perbandingan yang mencolok dengan PKI misalnya, ormas lainnya yang juga pernah populer di Indonesia, ternyata tidak cukup liat dan kenyal sehingga mengalami nasib nahas tidak mampu bangkit lagi setelah vonis mati dijatuhkan oleh pengadilan.

Apa yang membuat HTI memiliki simpanan energi hidup yang begitu besar, tentu menjadi topik kajian yang sangat menarik bagi para pakar yang memiliki perhatian

terhadap sejarah Indonesia modern. HTI telah membuktikan dirinya sebagai organisasi dengan sejumlah karakteristik yang membuatnya unggul dalam berbagai segi dalam dinamika kehidupan sosial-keagamaan dan perpolitikan Indonesia. Di tengah sikap pro dan kontra atas kiprah organisasi ini, HTI telah memberikan kontribusinya secara nyata yang membuat kita angkat topi mengakui eksistensi perkumpulan ini sebagai organisasi massa Islam berskala besar yang pernah hadir di Indonesia.

Perkembangan gerakan berikut berbagai respons terhadapnya yang datang dari pemerintah dan masyarakat tidak akan dapat dimengerti dengan baik tanpa pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang sejarah maupun ideologi keagamaan yang menjadi spirit utama yang menggerakkan organisasi ini.

B. Latar Belakang Sejarah

HTI (*Hizbut Tahrir Indonesia*) adalah cabang dari suatu organisasi transnasional bercorak pan-islamisme bernama HT (*Hizbut Tahrir*) yang diproklamkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1977) di Palestina pada 1953. Taqiyuddin adalah seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. HT sempat berkembang ke berbagai negara Arab di Timur Tengah dan Afrika seperti Mesir, Libia, Sudan, dan Aljazair. Menyebar ke Turki dan negara-negara kulit putih seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Austria, hingga ke Eropa Timur seperti Rusia, Uzbekistan Tajikistan, Kirgistan. Juga sampai ke Australia, dan negara-negara Asia seperti Pakistan, Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia.

Penyebaran yang masif ke seluruh dunia didorong oleh cita-cita HT untuk mengembalikan kejayaan Islam berdasarkan prinsip syariat (hukum Islam) dalam suatu pemerintahan bercorak "Khilafah". Untuk mencapai tujuan tersebut, HT memilih politik sebagai jalan perjuangan. Mengapa politik? Dalam risalah "Mafahim Hizbut Tahrir" (2001), Taqiyuddin menunjukkan fakta betapa dunia Islam sekarang ini mengalami kemunduran dan kemerosotan yang sangat buruk. Kebingungan, kekacauan, dan keterbelakangan seolah menjadi takdir Islam persis setelah berakhirnya kekhalifahan Turki Usmani pada 1924. Kejayaan Islam yang pernah hadir selama tiga belas abad dan menguasai 2/3 dunia hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Taqiyuddin mengingatkan keadaan umat Islam yang dahulu bersatu di bawah tegaknya hukum Allah

dengan penerapan Al-Quran sebagai dasar negara hancur tercerai-berai menjadi negara-negara kecil, terjajah secara politik dan kehilangan kedaulatan dalam segala bidang kehidupan. Runtuhnya Khilafah Usmaniyah adalah simbol kejatuhan Islam dan menjadi awal penderitaan umat Islam saat ini. Bagi Taqiyuddin fakta-fakto historis ini menjadi *raison d'etre* (alasan pembenar) berdirinya HT yang mengambil tanggungjawab untuk tegaknya kembali hukum Allah sebagai fondasi dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Di Indonesia nama HTI mulai sering muncul seiring dengan berbagai aksi demonstrasi yang mereka lakukan sepanjang tahun 2000-an (Mubarak, 128). Meskipun demikian, benih-benih ideologis HTI telah cukup lama hadir. Dalam catatan Said Ali (mantan petinggi BIN dan Wakil Ketua Umum PB NU 2010-2015), semuanya bermula tahun 1982 saat pengasuh pesantren Al-Ghazali Bogor Kiai Abdullah bin Nuh mengajak Abdurrahman Al-Baghdadi yang berkewarganegaraan Australia untuk datang ke Indonesia. Abdullah bertemu dengan Abdurrahman sewaktu berkunjung ke negeri kanguru tersebut. Tertarik dengan ceramah Abdurrahman mengenai persatuan Islam, Abdullah mengundang Abdurrahman ke Bogor sekaligus memperkuat jajaran pengajar di pesantrennya. Pesantren Modern Yayasan Al-Ghazali berlokasi di desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Tapi apakah Abdullah sendiri pengikut HT atau sekedar pengagum dari seorang Abdurrahman Al-Baghdadi secara pribadi, ternyata cukup ramai diperdebatkan.

Seperti diketahui, Abdullah bin Nuh (1905-1987) adalah figur besar yang tidak asing di tanah air, utamanya bagi umat Islam di wilayah Jawa Barat. Ia tercatat sebagai ulama yang ikut mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang di Indonesia (anggota PETA dan Laskar Hizbullah). Pernah menjadi anggota parlemen (KNIP). Di masa awal kemerdekaan Abdullah berjuang sebagai jurnalis di berbagai surat kabar dan majalah serta menjadi penyiar Bahasa Arab di RRI. Bersama tokoh nasional yang lain seperti Muhammad Hatta, Abdul Kahar Mudzakkir, Moh Natsir, Moh Roem, Wachid Hasyim, dan sebagainya, ia juga masuk dalam jajaran pendiri Universitas Islam Indonesia (UII). Mamak (panggilan Abdullah bin Nuh) juga mengarang banyak buku,

menulis karya puisi berbahasa Arab, menyusun kamus Arab-Indonesia, serta menerjemahkan kitab-kitab Arab ke bahasa Indonesia dan Sunda.¹

Uraian singkat itu cukup menjelaskan kebesaran Abdullah bin Nuh sebagai tokoh kharismatis yang disegani, sehingga tidak mengherankan bila nama besar itu diperebutkan, utamanya bagi organisasi baru seperti HTI yang perlu mendapat cantolan historis yang heroik yang bisa diceritakan ulang kepada publik dan penggemarnya di tanah air. Pertemuan pertama di Australia antara Mamak dan Abdurrahman pastilah momen yang paling penting untuk disebutkan, dan bagaimana persisnya peristiwa itu terjadi ternyata dinarasikan lebih dari satu versi. Versi pertama (lihat alinea di atas), yakni “Mamaklah yang tertarik dengan ide Abdurrahman mengenai persatuan dunia Islam,” namun penulis menemukan versi yang berbeda, yaitu justru “Abdullah-lah yang jatuh hati dan kepincut dengan gagasan Mamak perihal ukhuwah Islamiyah,” sebagaimana ditulis oleh Nashih Nashrullah (2020). Tentu saja masing-masing versi memberi makna historis yang bertolak belakang. Versi pertama sangat berarti bagi HTI, karena melalui versi tersebut HTI bisa mendaku dirinya sebagai organisasi Islam yang “sah” secara ideologis karena seakan-akan mendapat restu dari seorang ulama besar Indonesia. Sementara versi berikutnya akan sangat merugikan citra HTI, karena undangan Mamak kepada Abdurrahman bukan karena ketertarikan pada ideologi keagamaan HT, melainkan apresiasi Mamak secara pribadi saja kepada ulama Australia tersebut. Uraian-uraian tambahan mengenai hubungan di antara kedua orang ini serta beberapa argumen yang bisa dikaitkan dengan peristiwa tersebut, dapat menjernihkan versi mana sebenarnya yang lebih dekat kepada kebenaran sejarah.

Tentang versi kedua, ditekankan oleh Nashrullah Abdurrahmanlah yang tertarik pada Abdullah, sehingga ia pun memutuskan untuk mengikuti kiai Abdullah pulang ke Indonesia. Beberapa malam Abdurrahman Al-Baghdadi menginap di Bogor dan oleh Abdullah, ia dikenalkan kepada khalayak sebagai anak angkatnya. Kisah ini didasarkan pada tuturan putera bungsu sang kiai yang bernama KH Mustofa bin Abdullah bin Nuh, dimaksudkan untuk memberi penjelasan bahwa pendirian HTI tidak ada kaitannya secara langsung dengan dakwah Abdullah bin Nuh. Abdullah dari sejarah hidupnya adalah

¹ Lihat <https://www.nu.or.id/post/read/114629/kh-abdullah-bin-nuh--kiai-cianjur-yang-produktif-menulis>.

seorang nasionalis tulen yang sepanjang hidupnya berjuang untuk kemerdekaan bangsa, sungguh bertolak belakang gagasan beliau itu dengan ideologi HTI yang mengusung paham pan-Islamisme yang meleburkan batas-batas politik negara-bangsa.

Walaupun demikian, sulit untuk menghapus fakta bahwa Abdullah bin Nuh adalah ulama pertama yang membawa paham HTI ke Indonesia, entah itu terjadi secara sengaja atau tidak. Apa yang dilakukan beliau cukup besar pengaruhnya terhadap perkembangan Hizbut Tahrir, mengingat sekitar tahun 1980-an organisasi ini belum dikenal oleh masyarakat dan baru saja mulai berkat aktivitas dakwah Abdurrahman Al-Baghdadi. Dalam penelusuran Adi (2015), keterlibatan anak-anak Abdullah bin Nuh pada aktivitas dakwah HTI tidak nampak, kecuali pada anak keenam Raden Haji Toto Mustafa saat kuliah di Yordania. Ketika selesai belajar dan pulang ke Indonesia, Toto tidak pernah tercatat sebagai aktivis atau dai HTI. Namun dari keluarga kakak kandung Abdullah yang bernama Raden Haji Qosim bin Nuh, banyak sekali cucu-cucunya aktif di HTI. Beberapa di antaranya ada yang menjadi pengurus atau duduk sebagai pimpinan HTI di daerah. Adi mencatat misalnya Eri Muhammad Ridwan bin Nasikin Qosnuh bin Qosim bin Nuh yang menjabat Ketua DPD II HTI Wilayah Sukabumi; Raden Muhammad Musa bin Nasikin Qosnuh bin Qosim bin Nuh sebagai Ketua DPD II HTI Cianjur.

Tentu berat bagi “pendatang asing” dan “pemain baru” seperti HTI yang harus berjuang menghapus citra negatif dirinya sebagai gerakan keagamaan yang berhaluan radikal. Fakta-fakta sejarah ini tentu sangat berarti sebagai bukti yang meyakinkan bahwa organisasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Adi misalnya bercerita tentang seorang syabab HTI yang berkunjung ke salah seorang ulama yang dikenal sering memojokkan Hizbut Tahrir. Syabab tersebut berkunjung dengan maksud bersilaturahmi sekalian mengklarifikasi bahwa Hizbut Tahrir tidaklah seburuk dugaan si ulama. Syahdan syabab kemudian melihat foto KH Abdullah bin Nuh di salah satu pojok dinding rumah sang ulama. Syabab pun berkata, *“Ya Kyai, tahukah kyai siapa yang kali pertama membawa Hizbut Tahrir ke Indonesia?”* sang kyai balik bertanya, *“Siapa?”* Syabab tersebut menjawab, *“Itu beliau yang fotonya ada di dinding rumah Kyai.”* Sang kyai kaget dan spontan berkata *“Lha .. kalau begitu Hizbut Tahrir itu bagus dong.”* Jawab syabab kemudian, *“Iya, bagus Kyai,”* sembari tersenyum (Ibid.). Syabab adalah kosakata

khas HTI yang bermakna pemuda aktivis yang teguh dalam berislam dan terdepan dalam membela agama.

Sementara itu sang tamu Abdurrahman sendiri, Abdurrahman Al-Baghdadi, sejak di Australia sudah menjadi aktivis HT. Sebagai ulama yang berpengetahuan Islam mendalam, keberadaannya di pesantren memberi warna tersendiri dalam pengajaran agama kepada para santri. Ia juga pribadi yang menarik, mudah menjalin hubungan dengan banyak kalangan, termasuk dengan orang-orang muda dan para mahasiswa yang menjadi aktivis masjid Al-Ghifari di kampus IPB Bogor. Pria kelahiran Yordania ini walaupun namanya berseliweran dalam sejarah awal berdirinya HTI, biografinya tidak terlalu lengkap. Tidak ada keterangan mengenai tahun kelahirannya, kapan ia bermigrasi ke Australia, setelah berada di Indonesia kemana saja perginya, serta apakah ia masih hidup atau sudah wafat saat ini. Yang jelas sebagai keturunan Arab Timur Tengah, perawakannya di mata orang Indonesia tentu cukup meyakinkan. Dengan jenggot, hidung mancung, dan pakaian gamis, lengkaplah penampilannya sebagai ahli agama Islam yang mumpuni. Itu semua mendukung kebersamaannya dengan komunitas masjid Al Ghifari, sehingga tidak heran Abdurrahman berhasil merekrut banyak mahasiswa dan menggembleng mereka menjadi kader militan yang gigih memperkenalkan dan menyebarkan ajaran keagamaan Hizbut Tahrir. Para kader ini mempersiapkan berbagai materi keislaman yang berasal dari pendiri HT Taqiyuddin an-Nabhani. Buku-buku HT seperti *Syakhsiyah Islamiyah*, *Daulah Islamiyah*, *Fikrul Islam*, *Nizhom Islam*, dan sebagainya diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dikaji secara serius dalam *halaqah-halaqah* (pengajian-pengajian kecil) (Said Ali, 79).



Abdurrahman Al-Baghdadi
(Sumber Foto: eramuslim.com)

Karena dirintis di kampus dan digerakkan oleh mahasiswa, gagasan HTI banyak disambut oleh kalangan perguruan tinggi. Pada periode awal, perkembangan HTI terkonsentrasi di lingkungan mahasiswa muslim pegiat keagamaan atau yang biasa disebut para aktivis masjid kampus (Mubarak, 243). Melalui Jaringan Dakwah Kampus, ajaran HTI menyebar ke berbagai kampus di luar Bogor seperti Universitas Padjadjaran (Unpad), IKIP Malang, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, bahkan hingga keluar Jawa seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar (Said Ali, 80).

Kian hari gerakan HTI semakin mendapat sambutan di masyarakat. Hal ini terjadi di tengah suasana euforia reformasi politik Indonesia setelah runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto pada 1998. Tahun 2000-an, konservatisme seakan-akan menjadi norma keagamaan baru yang diadopsi oleh sebagian masyarakat, suatu masa yang dalam ungkapan van Bruinessen diistilahkan dengan “*conservative turn*,” atau “pergeseran praktik keagamaan Islam ke arah yang konservatif” (Bruinessen, 2014). Pada Maret 2002, HTI berhasil menghelat sebuah konferensi internasional Khilafah Islamiyah di Istora Senayan Jakarta, dengan dihadiri tokoh-tokoh HT dari seluruh dunia, seperti Ustad Ismail Al-Wahwah dari Australia, Ustad Syarifuddin M Zain dari Malaysia, dan sebagainya. Acara ini disebut-sebut sebagai tonggak lahirnya HTI secara resmi di Indonesia. Sejak saat itu organisasi semakin melebarkan sayapnya melalui berbagai aktivitas dakwah, seperti pengajian di kampus-kampus, unjuk rasa mengusung isu-isu keislaman dengan pengerahan massa, dan sebagainya. Pada 2006, HTI terdaftar sebagai ormas berbadan hukum melalui *Surat Keputusan Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor 44/D.III.2?VI/2006*.

Namun pada 2017 langkah HTI terhenti. Atas sikapnya yang dianggap inkonstitusional, Pemerintah RI mengeluarkan *Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan* untuk membubarkan HTI. Perppu secara tegas memuat ketentuan bahwa ormas yang berkedudukan di wilayah RI “dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta

menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”² Dalam hal ini HTI nyata-nyata ingin “mengganti Pancasila, UUD, NKRI, dan merah putih,” sehingga ia dikategorikan organisasi radikal yang mengancam keselamatan negara dan bangsa karena mengadopsi ideologi terlarang.³ Sebagai catatan, di beberapa negara Timur Tengah seperti Jordania, Tunisia, Mesir, *Hizbut Tahrir* ditengarai terlibat dalam aksi-aksi kudeta menentang pemerintahan yang sah. Fakta-fakta politik ini bukannya diabaikan dalam membuat keputusan hukum untuk mencegah organisasi dengan ideologi keagamaan tertentu memanfaatkan anggota-anggotanya merebut kekuasaan melalui jalur-jalur non-demokratis.

C. Ideologi Keagamaan

Di banyak literatur tentang wacana demokrasi di Indonesia, HTI secara ideologis digolongkan sebagai gerakan Islam radikal yang bercorak *non-mainstream* (Jamhari, 2004; Said Ali, 2012; Hadiz, 2016, Noorhaidi, 2020). Kata “radikal” yang berarti “kembali ke akar” (*radix*, latin = akar) sejatinya netral, bahkan positif ketika dimaknai sebagai “bergerak secara mendasar” atau “sampai kepada hal yang prinsip”. Di era pergerakan kebangsaan, misalnya, bersikap radikal artinya mengambil posisi yang tegas untuk menuntut kemerdekaan. Spirit radikal di masa itu menjadi modal perjuangan bangsa untuk melepaskan diri sepenuhnya dari penjajahan. Namun seiring bergesernya waktu, kata radikal kini telah mengalami pergeseran makna sehingga cenderung berkonotasi negatif atau peyoratif, yaitu “bersikap keras kepala terhadap pemerintah yang sah” karena “menggunakan asas non-kooperatif” dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Kata radikal kemudian disematkan kepada gerakan atau kelompok yang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dianggap “tidak mau diatur” atau “bergerak di luar tatanan”. Dengan warna radikal seperti itu, HTI mengambil posisi sebagai gerakan non-mainstream karena memiliki ciri-ciri ideologis, pandangan dan orientasi politik yang berbeda dengan kelompok-kelompok Islam *mainstream* seperti Muhammadiyah atau NU,

² Lihat <https://setkab.go.id/inilah-perppu-no-22017-tentang-perubahan-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/>, diakses tanggal 9 Mei 2020.

³ Lihat <https://www.vivanews.com/berita/nasional/18176-sering-bicara-radikalisme-istana-itu-ditujukan-ke-hti?medium=autonext>), diakses tanggal 18 Mei 2020.

yang lebih mengedepankan sikap moderat, kooperatif, tidak oposan, atau bisa berakomodasi ke dalam negara nasional.

Hubungan Islam dan politik adalah persoalan yang tidak pernah habis dibicarakan. Untuk membantu membuat terang beberapa persoalan yang krusial, di ranah kajian Islam para sarjana membedakan antara Islam sebagai keyakinan dan Islamisme sebagai gejala politik keagamaan. Ciri-ciri politis yang melekat pada HTI menunjukkan bahwa organisasi itu lebih condong kepada Islamisme daripada suatu gerakan yang mengambil Islam sebagai spirit peradaban atau sebagai pedoman hidup bersama bagi kemanusiaan. Bassam Tibi di bukunya (2016) menjelaskan bahwa perbedaan kedua istilah adalah sangat penting, karena Islam tidak identik dengan Islamisme. Menurutnya, Islamisme bukanlah refleksi dari iman religius Islam, melainkan sekedar penerapan ideologis atas agama di ranah politik (Tibi, vi). Ini didasarkan pada makna dari kata Islam itu sendiri yang berarti “damai” atau “mendamaikan”, dimana di atas prinsip itu umat Islam bisa menjalin suatu kehidupan yang damai dengan warga non-Muslim. Di sisi lain, Islamisme justru menciptakan kerenggangan dan keretakan antara Muslim dan non-Muslim.

Islamisme mengklasifikasikan seluruh kalangan non-Muslim sebagai *kuffar* (orang-orang kafir) sebagai identitas bahwa mereka adalah “musuh Islam.” Bahkan wilayah permusuhan sesungguhnya lebih luas, karena kalangan Muslim sekalipun bila saja tidak sependapat akan ikut dianggap pihak yang harus diperangi. Noorhaidi (2020) dalam suatu keterangan lisan yang diunggah di kanal *Youtube*, menyebut aura permusuhan ini berakar pada doktrin *al-wala’ wa-l-bara’* (loyalitas dan pengingkaran, *loyalty and disavowal*). *Al-wala’* itu artinya loyal, cinta, senang, mendukung orang-orang yang satu paham, satu pikiran, satu aliran. Sementara *al-bara’* artinya menjauhi, membenci orang-orang yang tidak satu paham, tidak satu aliran, tidak satu keyakinan. Noorhaidi menjelaskan hal tersebut ketika mengamati maraknya fenomena “hijrah” akhir-akhir ini yang terjadi di tengah warga muslim perkotaan, yang menurut banyak pengamat merupakan gerakan kultural keagamaan berbasis remaja dan kaum muda usia yang diinisiasi oleh HTI (Asad, 2019; Yazid, 2020).

Berdasarkan doktrin *al-wala’ wa-l-bara’*, dunia dibelah menjadi dua bagian, yaitu dunia jahiliyah dan dunia non-jahiliyah. Dunia jahiliyah adalah dunia yang penuh dengan

kesyirikan, kemunafikan, bid'ah, dan sebagainya. Sebaliknya non-jahiliyah adalah dunia yang penuh rahmat dan kasih sayang. Dengan penggambaran yang politis, melalui doktrin ini menurut Noorhaidi banyak anak-anak muda terjebak ke dalam pemikiran yang keliru. Ini jalan bagi mereka untuk membenarkan paham *hakimiyah*, yaitu suatu ajaran untuk tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Sayangnya dengan pemaknaan yang sempit, prinsip ini semakin membawa mereka terpuruk ke dalam jurang kekerasan. Serasa menggunakan doktrin jihad tapi sebenarnya diliputi oleh hawa napsu untuk menebarkan permusuhan dan tindakan radikalisme, bahkan terorisme.

Tentu saja HTI menolak penggambaran seperti di atas. Aktivis HTI berpegang pada keyakinan, bahwa Islamisme yang mereka perjuangkan adalah perwujudan dari ajaran agama yang benar. Mengenai pemberlakuan hukum Allah atau syari'at, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto di artikelnya (2003) menulis, itu harus dilakukan karena situasi dunia saat ini - termasuk Indonesia – mengalami krisis di segala bidang. HTI menilai sistem demokrasi sekuler yang dipraktikkan negara telah gagal mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan oleh Islam. Agama ditempatkan hanya sebagai urusan individu, sementara dalam urusan sosial-kemasyarakatan agama (Islam) ditinggalkan, sehingga muncullah di tengah-tengah sistem sekularistik tadi berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Krisis kehidupan multi-dimensional pun terjadi akibat diadopsinya sistem ekonomi kapitalistik, yang pada gilirannya menyuburkan perilaku politik oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretik, serta sistem pendidikan yang materialistik (Yusanto, 142). Intinya doktrin *al-wala' wa-l-bara'* memang dipegang, namun itu adalah upaya membuat garis demarkasi antara sistem Islam yang sempurna (*kaffah*) yang mencakup segala segi kehidupan dengan sistem non-Islam yang parsial dan sekularistik yang terbukti bangkrut dan ditinggalkan para pendukungnya (Ibid., 144). Di berbagai kesempatan Yusanto selalu mengulangi pernyataan, bahwa hanya syariat Islam sajalah – karena kelengkapan dalam sistem yang ditawarkan - yang mampu menjawab berbagai persoalan yang tengah membelit negara, baik di lapangan ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan, setelah berbagai ideologi sekularistik (Yusanto mencontohkan kapitalisme dan sosialisme) gagal memenuhi harapan.

HTI melansir ideologi Islam-nya dengan rumusan yang ringkas padat, yakni: tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam, tidak ada Islam kecuali dengan syariat, dan tidak ada syariat kecuali dengan adanya daulah. Ini adalah rantai argumen yang menguatkan alasan keharusan berdirinya negara Islam sebagai prasyarat bisa tegaknya syariat dan kejayaan agama Islam. Namun, alasan normatif barulah salah satu, Yusanto juga mengemukakan dalih sosiologis sebagai dasar pertimbangan pentingnya negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia untuk memakai syariat Islam sebagai dasar negara. Yusanto menulis (145):

Perjuangan bagi tegaknya syariat Islam di negeri ini jelas sangatlah penting. Secara imani, perjuangan itu merupakan tuntutan akidah Islam. Secara operasional, pemberlakuan syariat Islam kiranya juga akan nyambung dengan denyut nadi iman atau keyakinan mayoritas penduduk negeri ini yang muslim. Bila itu bisa diwujudkan, maka gagasan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara juga menjadi bagian dari ibadah setiap muslim akan dapat diwujudkan secara nyata.

Ideologi politik sebagai suatu *grand-design* dari sikap elementer dalam berbangsa dan bernegara umumnya bersifat eksklusif atau tertutup. Artinya tidak mudah bagi suatu ideologi untuk menerima begitu saja anasir luar yang bertentangan dengan prinsip dasar ideologi tersebut. Jelas ini bukan khas HTI, semua organisasi dan golongan politik secara ideologis memiliki kecenderungan eksklusif yang sama. Sejarah membuktikan, bahwa benturan antar-ideologi telah menjadi satu tema besar yang mewarnai kisah-kisah kemanusiaan di masa lampau. Begitu halnya dengan sejarah umat Islam, termasuk di Indonesia, dimana perselisihan antar-golongan gampang sekali membuncah bahkan tidak jarang berkembang menjadi pertikaian berdarah akibat perbedaan ideologi politik ini.

HTI yang terkunci dalam ideologi Islamismenya berada dalam situasi sulit. Kenyataannya, sejarah HTI di Indonesia terpaksa berakhir karena ketidakmampuannya menyesuaikan diri saat diuji dalam *locus* dan konteks ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia yang secara historis terlanjur terbentuk melalui prosedur demokrasi Pancasila, ideologi politik yang menjadi antitesis Islamisme-nya HTI.

D. Kiprah dan Dinamika Gerakan

Untuk mewujudkan niatnya mendirikan daulah Islam, HT mengampanyekan konsep “khilafah” yang kemudian menjadi *trade mark* dari organisasi ini. Dari pusat hingga ke pelosok di negara mana pun berada, para aktivis HT satu suara mengumandangkan falsafah kekhalifahan ini. Sesuai visi politik yang digagas bahwa urusan kenegaraan (pemerintahan) dan keumatan hanya mungkin berlangsung dalam suatu wadah politik berdasar syariah, maka penegakan negara khilafah menjadi keniscayaan sebagai suatu kewajiban keagamaan yang harus direalisasikan. HT meyakini bahwa kerusakan yang terjadi pada kaum Muslimin sesungguhnya berakar pada penghancuran lembaga khilafah pada tahun 1924. Oleh karena itu HT (di tingkat global) dan HTI (untuk konteks Indonesia), menitikberatkan perjuangannya dalam mengembalikan kejayaan Islam melalui tegaknya lagi Khilafah Islamiyah.

Sebagai partai politik, aktivitas HTI dikemas dalam berbagai kegiatan, yang apa pun bentuknya selalu disebut sebagai *dakwah siyasi* (Arifan, 94). *Dakwah siyasi* ini merujuk pada sejarah Nabi Muhammad, yang perjuangannya dalam menegakkan ajaran Islam dijadikan model sekaligus metode dalam menyusun pentahapan dakwah HTI. Dunia saat ini bagi HTI adalah ladang dakwah karena statusnya sebagai *darul kufur* akibat diabaikannya hukum-hukum Allah SWT dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia bukanlah pengecualian, dan situasinya mirip kota Mekkah di awal kerasulan Muhammad dimana praktik-praktik kemusyrikan dan kemungkaran merajalela. Oleh karena itu *dakwah siyasi* merupakan kewajiban yang tidak terelakkan. Untuk menjamin keberhasilannya, *dakwah siyasi* memerlukan langkah-langkah taktis yang disusun dalam tiga tahapan, yaitu:

Pertama, Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (*marhalah at tatsqif*), tujuannya adalah membentuk kader-kader militan yang mempercayai ideologi dan metode *Hizbut Tahrir*. Tahapan ini menjadi pondasi bagi partai untuk memperkuat kerangka gerakan.

Kedua, Tahapan Berinteraksi dengan Umat (*marhalah tafa'ul ma'a al ummah*), dimaksudkan untuk menggelisahi (memprovokasi) umat agar merasa ikut bertanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan dakwah Islam. Pada tahapan ini diharapkan tumbuhnya komitmen kepada partai, ditandai dengan bergeraknya umat bersama dengan partai untuk berjuang mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Terjadi pergolakan

pemikiran (*ash-Shira'ul fikri*) dan perjuangan politik (*al-Kifa as-Siyasi*) antara umat dan penguasa zalim yang menghalangi ideologi *Hizbut Tahrir*.

Ketiga, Tahapan Penerimaan Kekuasaan (*marhalah istilaam al hukm*), atau dalam bahasa yang lebih lugas adalah fase “Perebutan Kekuasaan”. Pada tahapan ini terjadilah pengambilalihan pemerintahan oleh partai untuk menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Jatuhnya rezim kekuasaan menjadi momen dimulainya pemerintahan Khilafah Islam.⁴

Dari paparan di atas, terlihat bahwa HTI telah menapaki tahapan pertama dengan sukses. Kader-kader HTI sangat memadai jumlahnya dan militansi mereka teruji dengan maraknya berbagai kegiatan dalam berbagai bentuk yang diadakan HTI di berbagai tempat di Indonesia. Dihitung sejak kedatangan Abdurrahman Al-Baghdadi ke kota Bogor, berarti sudah hampir empat dekade *Hizbut Tahrir* berada di Indonesia. Sudah cukup matang dari segi usia, dan secara penanaman ideologi juga cukup mapan. Terbukti walaupun pada 2017 telah dibekukan oleh Pemerintah RI, nyatanya secara *de facto* organisasi ini masih eksis dan bergerak cukup atau bahkan sangat aktif di masyarakat. Daya hidup yang ditunjukkan HTI luar biasa, dan bagaimana kiat jamaah ini mampu menyalahi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghalangi gerakannya, kiranya perlu dipelajari secara serius sebagai bahan pembelajaran bagi narasi pembinaan ormas dan penguatan kebangsaan yang semakin digencarkan hari-hari belakangan ini.

Melihat lagi ke belakang, nama HTI mulai sering muncul ke publik seiring gencarnya organisasi ini melakukan berbagai aksi massa (demonstrasi) yang mengusung tema-tema Islam, tetapi secara konsisten mereka selalu memberikan tekanan pada isu pendirian Khilafah Islam (Mubarak, 128). Apalagi saat maraknya semangat penerapan syariat Islam di berbagai Pemerintah Daerah, HTI tercatat sebagai organisasi terdepan yang sangat getol melakukan tekanan politik atas nama massa untuk menggolkan proyek formalisasi hukum Islam itu (Burhanuddin, 2003). Tujuan HTI tidak selalu sejalan dengan organisasi Islam pro-syariat yang lain, namun momen keterbukaan pasca-reformasi adalah

⁴ Lihat <https://tarbawiyah.com/2018/04/09/mengenal-hizbut-tahrir/>, diakses tanggal 10 Juni 2020.

peluang emas bagi HTI untuk merintis kebersamaan dengan organisasi seiman demi menyatakan kehadirannya di bumi Indonesia.

Sejak awal berdirinya, HTI aktif merespons berbagai peristiwa penting yang terjadi di tanah air. Lebih dari itu, untuk mendukung penyebaran ideologinya mereka rajin menerjemahkan dan menerbitkan berbagai buku yang juga menjadi bahan kajian agama di halaqah-halaqah yang diadakan HTI. Buku-buku ini sebagian besar adalah buah pikiran dan hasil ijtihad Taqiyuddin An-Nabhani, seperti *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam), *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam), *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik), *Daulatul Islamiyah* (Negara Islam), *Muqaddimatu ad-Dustur* (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam), *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah), dan lain sebagainya. Tentu saja sebagian besar buku-buku HTI membawa wacana politik Islam sebagai representasi dari pandangan keagamaan pendirinya An-Nabhani. Bahkan tema akhlak atau muamalah sekalipun selalu dikaitkan atau disajikan dalam konteks kejayaan politik (khilafah) Islam. Ada sekitar 50-an buku dan leaflet yang bisa diperoleh dengan mudah di internet dalam format pdf. Di sini terbukti internet adalah media teknologi yang sangat dikuasai oleh HTI sebagai wahana komunikasi massa organisasi. Sempat HTI meluncurkan situs web resmi www.hizbut-tahrir.or.id pada 2004 (kini sudah diberangus Menkominfo RI), dua tahun sebelum HTI terdaftar sebagai ormas lewat terbitnya *Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor 44/D.III.2/VI/2006* tanggal 22 Juni 2006.

Ketok palu hakim yang mengakhiri status hukum HTI terjadi pada 2017. Sejak saat itu organisasi ini mengubah dirinya menjadi perkumpulan klandestin, yaitu bergerak di bawah tanah secara rahasia dan diam-diam. Tetapi "bawah tanah" gaya HTI bukanlah kenelangsaaan ala rakyat Vietnam yang melata di gorong-gorong bawah tanah tatkala melawan tentara kolonial AS. Bawah tanah HTI adalah kemewahan era milenial, dimana HTI dengan status ilegalnya, tetap leluasa menjalankan berbagai kegiatannya di ranah publik. Bahkan tanpa sungkan mempromosikan dan menyosialisasikan pelaksanaannya di tempat-tempat pertemuan mewah di berbagai hotel. Sebuah penelitian oleh Ahmad Yazid (2019) melaporkan fenomena dakwah gaya baru ini oleh *KEY* (*Kelas Eksekutif YukNgaji*) yang berlangsung di kota Yogyakarta. *KEY* adalah kelompok pengajian anak-anak muda

dan remaja yang didirikan oleh aktivis HTI, seperti Felix Y. Siau, Husain Assadi, dan tokoh lainnya. Komunitas yang dibentuk tahun 2016 ini sangat terampil dan profesional mengemas ide-ide keagamaan yang berat menjadi sajian pengajian yang ringan, atraktif, dan sesuai dengan kultur anak muda. Menurut Yazid, hingga tahun 2020 *KEY* sudah melebarkan sayap di berbagai provinsi serta berhasil mendirikan cabang pengajiannya minimal di 34 kota di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta.

Aktivis *KEY* membahasakan kegiatan pengajian mereka dengan istilah *hijrah*, sebuah terma yang mengacu kepada upaya seorang muslim untuk menjadi pribadi yang taat beragama namun dengan cara yang khas *KEY*, yakni tetap modis dan ceria sebagai warga milenial yang mengikuti perkembangan zaman. Intinya beragama itu tidak harus suntuk dan kuno, begitulah kira-kira sapaan *KEY* kepada orang muda perkotaan untuk tetap bangga ber-Islam di tengah gemerlap kemajuan dan kemoderenan. HTI melalui *KEY* jelas sekali melihat orang-orang muda sebagai pangsa pasar potensial untuk mengenalkan ide-ide keagamaan mereka. Sebuah lingkaran pertemanan dalam bentuk komunitas yang penuh keakraban pastilah akan besar manfaatnya sebagai wadah pembinaan kader-kader baru yang akan melanjutkan cita-cita HTI. Suasana pengajian *KEY* seperti dilaporkan Yazid, sebenarnya lebih mirip seminar motivasi dan bisnis daripada acara keagamaan. Untuk itu HTI perlu diberi dua jempol untuk inovasi kegiatan mereka, bila diingat bahwa aktivitas *KEY* sesungguhnya bukanlah sekedar pengajian, melainkan aktivitas *indoktrinasi ideologi* yang berhasil dilakukan secara sistematis dan rapi. Kemampuan membaca tanda-tanda zaman inilah kunci bertahannya HTI, sehingga ideologi Islamismenya tetap bergelora walaupun organisasi pengusungnya dinyatakan terlarang di bumi Indonesia.

E. Penutup

Melongok kembali kisah perjalanan HTI sejak tiba ke Indonesia, serta ragam aktivitas organisasinya yang variatif di setiap masa dan tempat mulai dari forum-forum serius dan ilmiah di kampus-kampus perguruan tinggi hingga pengajian eksotis bergaya milenial mereka di hotel-hotel mewah, adalah gambaran dari kepiawaian HTI membaca tanda-tanda zaman dan keandalannya dalam beradaptasi guna mempertahankan eksistensi organisasi. Berbagai inovasi dalam aktivitas dakwah dijalani sebagai kemestian demi menjamin berlangsungnya diseminasi gagasan secara berkelanjutan. Jalan untuk

mendiseminasikan gagasan tersedia sangat banyak, dan HTI terbukti mampu menyusurnya secara telaten dan sistematis. Bahkan ketika status legal-formalnya di depan hukum berakhir, organisasi ini nyatanya tetap eksis dan berkiprah di masyarakat bahkan terus mewarnai wacana kehidupan umat dan bangsa di Indonesia, walaupun untuk itu HTI terpaksa melakoninya sebagai organisasi klandestin yang bergerak secara rahasia di bawah tanah.

Sehubungan dengan bendera Islamisme yang diusung, sejumlah tantangan sudah pasti akan menghadang HTI di masa-masa yang akan datang. Sejauh ini HTI mampu bertahan karena faktor militansi para pendukung yang solid dalam memberikan sokongan dan perlindungan. Di sini HTI terkesan diuntungkan dengan gejala konservatisme agama di Indonesia yang tetap bertahan. Namun adanya pandangan beragam dari interen umat Islam sendiri terhadap konsep syariat dan Khilafah Islam, adalah faktor yang perlu diperhitungkan. Selain itu, perkembangan yang dinamis dalam kehidupan politik, demokrasi, dan pemerintahan juga akan terus berperan membentuk variasi persepsi dan apresiasi masyarakat terhadap sosok organisasi Islamis yang ulet ini.

F. Referensi

- Ahmed, Houriya & Hannah Stuart. 2009. *Hizb ut- Tahrir: Ideology and Strategy*. London: The Centre for Social Cohesion.
- Ali, As'ad Said. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Arifan, Fadh Ahmad. 2014. "Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia," dalam *Jurnal Studi Sosial*, Th. 6, No. 2, November, hlm. 94-102.
- Bruinessen, Martin van. 2014. *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, terj. Agus Budiman. Bandung: Mizan.
- Darraz, Muhammad Abdullah. 2017. *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme*. Bandung: Mizan.
- Hadiz, Vedi R. 2016. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*, terj. Ninus Andarnuswari. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, Komaruddin (ed.). 2014. *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila*. Bandung: Mizan.
- Hizbut Tahrir. 2009. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, terj. Yahya AR. Jakarta: HTI-Press.
- Husain, Ed. 2017. *Pengakuan Pejuang Khilafah*, terj. Rh Widada. Yogyakarta: Gading.
- Hwang, Julie Chernov. 2011. *Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki*. Terj. Samsudin Berlian. Jakarta: Freedom Institute.
- Jamhari (eds.). 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Kazhim, Musa. 2016. "Islam dan Islamisme: Sebuah Tanggapan," dalam Bassam Tibi. 2016. *Islam dan Islamisme*. Bandung: Mizan
- Kersten, Carool. 2018. *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*, terj. M Irsyad Rafsadie. Bandung: Mizan.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2010. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Mubarak, M. Zaki. 2007. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Nabhani, Taqiyuddin an-. 2012. *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq. Jakarta: HTI-Press.
- _____. 2001. *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj. Abdullah. Jakarta: HTI-Press.
- Nashir, Haedar. 2007. *Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Rahmat, M. Imdadun. 2009. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sholeh, Moh. 2017. *Khilafah sebagai Produk Sejarah, bukan Produk Syariah*. Yogyakarta: Istana Publishing.

- Tibi, Bassam. 2016. *Islam dan Islamisme*, terj. Alfathri Adlin. Bandung: Mizan.
- TNI, Mabes. 2010. *Menghidupkan Kembali Kekhalifahan di Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Strategi Mobilisasi dan Dampaknya bagi Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi.
- Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute dan Maarif Institutue.
- Yazid, Ahmad. 2019. "Politik Hijrah Anak Muda di Komunitas Yukngaji Yogyakarta," dalam *Tesis Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2003. "Selamatkan Indonesia dengan Syariat," dalam Burhanuddin (ed.), *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*. Jakarta: JIL, hlm. 137-71.

Sumber Internet

- Asad, Muhammad. 2019. "Tren Hijrah dan Politik Ukhuwwah Islamiyah" dalam <https://alif.id/read/muhammad-asad/tren-hijrah-dan-politik-ukhuwwah-islamiyah-b222851p/>
- Hizbut Tahrir. Tanpa Tahun. "Tarbawiyah, Kumpulan Materi Tarbiyah: Mengenal Hizbut Tahrir," dalam <https://tarbawiyah.com/2018/04/09/mengenal-hizbut-tahrir/>
- Nashrullah, Nashih. 2020. "Benarkah KH Abdullah bin Nuh Bawa Paham HTI ke Indonesia?," dalam <https://republika.co.id/berita/q9tw5g320/benarkah-kh-abdullah-bin-nuh-bawa-paham-hti-ke-indonesia>
- Noorhaidi. 2020. "Mutiara Ramadhan #9 di Masjid Kampus Mardliyyah UGM: Hijrah di Kalangan Kaum Muda Muslim Kota," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ShTuOPG4aNM&t=22s>
- Nugroho, Aditya. 2011. "Abdurrahman Al Baghdadi: Khilafah tidak Akan Tegak Lewat Demokrasi," dalam <https://www.eramuslim.com/berita/bincang/abdurrahman-al-baghdadi-khilafah-tidak-akan-tegak-lewat-demokrasi.htm#.XvRnAOcxVqM>
- Octaviyani, Putri Rosmalia. 2019. "HTI Sah Ormas Terlarang," dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/217300-hti-sah-ormas-terlarang>
- Sekretariat Kabinet RI. 2017. "Inilah Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," dalam <https://setkab.go.id/inilah-perppu-no-22017-tentang-perubahan-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/>
- Tim VIVA. 2019. "Sering Bicara Radikalisme, Itu Ditujukan ke HTI," dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1245076-sering-bicara-radikalisme-istana-itu-ditujukan-ke-hti?medium=autonext>
- Victoria, Adi. 2015. "Sejarah Awal Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia," dalam <https://www.kompasiana.com/adivictoria/552c933f6ea8340d6f8b4592/sejarah-awal-masuknya-hizbut-tahrir-ke-indonesia>

“KH Abdullah bin Nuh, Kiai Cianjur yang Produktif Menulis,” dalam
<https://www.nu.or.id/post/read/114629/kh-abdullah-bin-nuh--kiai-cianjur-yang-produktif-menulis>